PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Senin Tanggal: 09 April 2018 Halaman: 8

PNS

Ada Tukin, Penataan Pegawai Tertunda

JOGJA - Hampir setahun jalannya pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi belum menyelesaikan proses penataan pegawai. Ditambah mulai diterapkannya pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) berupa tunjangan kinerja (Tukin) yang masih menimbulkan persoalan.

"Saya belum tahu kenapa belum selesai, tapi dulu waktu raker dengan Komisi A dijanjikan penataan dimulai sejak Februari dan April ini sudah menyelesaikan untuk eselon II," ujar anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti kemarin (8/4).

Tata kala yang disampaikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja itu diakuinya sudah lewat, karena hingga kemarin belum ada pelantikan pejabat. Pemkot Jogja baru melakukan pelantikan tenaga fungsional di Balai Kota Jogja, kemarin (6/4).

Tapi, dari informasi yang beredar momentum penataan pegawai yang berbarengan dengan penerapan Tukin juga membuat proses penataan tidak bisa langsung dilakukan. Hal itu karena penerimaan Tukin yang berdasarkan pada klasifikasi kelembagaan dan tipe Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bambang mengatakan, Bagian Organisasi mengaku masih akan melakukan evaluasi pelaksanaan Tukin. "Dalam penerapannya Tukin masih ada kendala, mungkin itu juga yang membuat penataan tidak bisa langsung dilakukan," tuturnya.

Kendala yang dimaksud politikus PKS itu adalah pemberian Tukin yang berdasarkan pada tipe OPD. Di Pemkot Jogja, OPD dibagi dalam tipe A, B, dan C. Tipe-tipe OPD tersebut, lanjut dia, juga berbeda dalam penerimaan Tukin, sesuai dengan tipe OPD.

"Meski sama-sama PNS dan bekerja, tapi karena berada di tipe C pendapatannya bisa *njomplang* dibanding yang tipe A," tuturnya.

Hal itu, tambah Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja itu yang bisa berpengaruh dan menghambat dalam penataan pegawai. Salah satunya akan ada PNS yang menjauhi OPD tipe C atau yang pendapatan Tukin lebih rendah. Juga bisa merasa dibuang jika ditempatkan di OPD tipe C.

"Kalau tidak segera diselesaikan, proses penataan maupun evaluasi Tukin bisa bermasalah," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi ditemui usai pelantikan pejabat fungsional mengatakan, untuk penataan pegawai sudah dipersiapkan sejak lama. Tapi yang bisa dilakukan hanya untuk pejabat eselon III dan IV, sedang untuk pejabat eselon II harus melalui tim panitia seleksi (Pansel).

"Kami sekarang sudah mulai membentuk dua Pansel, satu untuk rotasi dan satunya untuk promosi," jelasnya. **(pra/lla/er)**

Yogyakarta, Pit.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi 2. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005